

Pengantar:
Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

Editor:
Dr. Muryanti, M.A

dinamika masyarakat
di era pandemi



DINAMIKA MASYARAKAT DI ERA PANDEMI

Editor: Dr. Muryanti, M.A

Penata Sampul: Nur Hadi Prabowo

Penata Isi: Lisa Aditia Putra

Manggar Media

Munggur RT 06, No. 16, Srimartani Piyungan Bantul,
Yogyakarta 55792

WA: +6285694837418

E-mail: mediamanggar@gmail.com

Website: www.manggarmedia.com

Laboratorium Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

Email: isoshum@uin-suka.ac.id

Instagram: [@labsos_uinsuka](https://www.instagram.com/labsos_uinsuka)

Yogyakarta: Manggar Media, 2020
x+355 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-94594-0-6

Cetakan Pertama: Oktober 2020

Pengantar Editor

Alhamdulillah kumpulan tulisan tentang masyarakat di era pandemi ini dapat selesai dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang bisa dinikmati oleh pembaca. Proses panjang dalam penulisan diawali dari mulai munculnya pandemi. Tidak mudah untuk menyajikan kumpulan tulisan ini, mengingat penulis menjadi aktor yang terlibat didalamnya. Para penulis berusaha merefleksikannya dalam sebuah tulisan yang bisa dikaji secara ilmiah.

Datangnya pandemi yang tidak terduga sebelumnya, tentu mengejutkan semua orang dan menyebabkan terjadinya perubahan revolusioner. Perubahan ini melanda semua sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sampai detik buku ini ditulis, semua aktor (negara, masyarakat dan semua warga di posisi apa pun dan bagaimana pun) masih berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang disebabkan oleh virus Covid-19 ini.

Terkait dengan terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis artikel dalam buku ini, yang berjuang untuk menyelesaikan tulisannya pada situasi dirinya menyesuaikan segala perubahan yang disebabkan oleh pandemi ini. Tulisan Bapak/ibu dan mahasiswa semua merupakan bagian penting sebagai sebuah refleksi dari arus perubahan yang terjadi. Tulisan-tulisan yang tertulis dalam buku ini merupakan catatan refleksi yang benar-benar dialami oleh penulis sebagai bagian dari siapa pun yang terdampak pandemi.

Harapan terbesar kami, apa yang kami tulis dalam buku ini bisa menjadi rangkaian *puzzle* besar tentang situasi pandemi yang bisa kita rangkai dengan fenomena lain yang berserakan. Kemudian dapat kita refleksikan bahwa pandemi ini sebenarnya merupakan perjalanan sejarah manusia yang mereka rangkai sendiri, oleh tindakan atau perilaku kita. Pandemi bukanlah sebuah

fenomena tunggal yang berdiri sendiri. Sebaliknya pandemi ini merupakan siklus perjalanan hidup *homo sapiens* sebagai sesuatu hal yang harus diadaptasi. Tidak ada gading yang tidak retak, buku ini banyak sekali kekurangan yang belum dituliskan. Mengingat riset yang dilakukan sebagian merupakan mini riset. Harapan kami, buku yang masih banyak kekurangan ini bisa diterima oleh pembaca menjadi sebuah catatan kecil perubahan sosial yang bersifat keniscayaan.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Editor

Dr. Muryanti, MA

Pengantar Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sunan Kalijaga

Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

A*lhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kehadiran Allah SWT, telah terbit salah satu karya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga dengan judul **“Dinamika Masyarakat di Era Pandemi”**. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada FISHUM dalam hal ini Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISHUM yang terus semangat mendukung civitas akademika FISHUM terus berkarya. FISHUM Muda, FISHUM Terkemuka tidak hanya tagline yang diucapkan tapi juga diimplementasikan. Karya ini menjadi bukti bahwa FISHUM mampu berkarya secara kolaboratif yakni antara dosen dengan mahasiswa.

Karya ini merupakan salah satu potret perubahan sosial yang terjadi. Pandemi Covid-19 benar-benar membawa kita semua kepada kenormalan-kenormalan yang baru. Secara sosiologis, dinamika masyarakat yang sangat kompleks dan perubahan yang terjadi misalnya dalam dunia pendidikan serta perubahan terhadap ritual keagamaan terdokumentasi dalam karya ini. Selain dua hal tersebut, soal pola komunikasi dan penyampaian informasi juga menjadi hal yang menarik di era pandemi ini. Keterbukaan informasi, penggunaan media sosial, *citizen journalism*, serta bagaimana literasi media menjadi hal yang hari ini disoroti.

Keterbukaan dan kebebasan menyampaikan informasi memang menjadi keunggulan tersendiri di era pandemi ini. Bagaimana tidak? Kegiatan masyarakat yang semula dilakukan secara tatap muka (*offline*) tiba-tiba berubah menjadi online atau dilakukan secara daring. Dunia maya seperti

internet dengan berbagai platform media sosial yang ditawarkan menjadi pusat interaksi manusia saat ini. Tidak melihat latar belakang, pendidikan, suku, bangsa, atau tujuan politik apapun. Namun akibatnya, keunggulan ini melahirkan fenomena banjir informasi. Banyak informasi *hoax* (informasi yang menyimpang) yang terjadi dikalangan masyarakat dan lain sebagainya. Tentu beberapa contoh kasus soal ini juga dibahas dalam buku ini.

Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Tentu saya berharap akan lahir lebih banyak lagi karya-karya yang kontekstual. Saya juga berharap, karya ini mampu menginspirasi bagi prodi dan jurusan lain di semua Fakultas di UIN Sunan Kalijaga. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pengantar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*A*lhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmatnya satu karya Bunga Rampai dengan judul **“Dinamika Masyarakat di Era Pandemi”** telah terbit. Satu lagi karya civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat khususnya untuk Prodi Sosiologi dan Dr. Muryanti, M.A. selaku Editor sekaligus saat buku ini terbit beliau juga sebagai Ketua Prodi Sosiologi FISHUM UIN Sunan Kalijaga. Di era pandemi, dengan segala keterbatasan akses, Prodi Sosiologi yang tergabung dalam tim tetap bisa menghasilkan karya yang kontekstual, yakni topik soal pandemi dan bagaimana masyarakat menghadapinya.

Pandemi Covid-19 memang menguji kita semua. Tidak hanya dunia kesehatan, adanya pandemi Covid-19 juga menguji dunia pendidikan, ekonomi, bahkan sosial. Saya melihat ada beberapa tulisan yang cukup menarik dari buku ini, misalnya soal penerapan protokol kesehatan dan perturan baru yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh masyarakat. Fenomena ini kemudian kita sebut sebagai Era New Normal. Terjadi dinamika yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita pasca adanya pandemi Covid-19.

Ada beberapa poin kunci yang bisa kita lihat, *pertama* soal penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari New Normal. *Kedua*, soal informasi baik informasi dari pemerintah kepada masyarakat, media televisi maupun dari masyarakat kepada masyarakat melalui media sosial. Keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, karena era new

normal mengharuskan kegiatan-kegiatan yang semula offline menjadi online (daring). Adanya informasi yang menyimpang hingga soal kebocoran data juga terjadi.

Ketiga, yang tidak kalah penting dibahas dalam buku ini ialah soal bagaimana relasi masyarakat secara kolektif dan diri sebagai individu dalam beragama. Tentunya berkerumun dan melaksanakan ritual keagamaan secara kelompok sudah menjadi habit (kebiasaan) masyarakat kita. Tantangan ekspresi keagamaan masyarakat dalam hal ini benar-benar di uji. *Keempat*, bagaimana tulisan dan mini riset dalam tulisan ini menjadi hasil karya akademik yang reflektif yang mampu membawa kita semua membaca fenomena sosial pasca adanya Covid-19. Dinamika-dinamika ini yang kemudian bisa kita petakan, apa yang menjadi tantangan kita saat ini? Adaptasi dengan cepat dan tepat menjadi kunci kita bangkit dan melawan pandemi Covid-19.

Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku bunga rampai ini. Selamat kepada semua penulis, semoga, civitas akademika FISHUM terus produktif berkarya. FISHUM Muda, FISHUM Terkemuka. Kita suka UIN Suka, UIN Suka untuk Bangsa, UIN Suka Mendunia. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Daftar Isi

Kata Pengantar | iii

Daftar Isi | ix

Masyarakat Resiko di Pedesaan: antara Ketidaktaatan Pada Protokol Kesehatan dan Solidaritas yang Terbangun | 1

Muryanti

Dinamika Daring *Learning* di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Pemerintah, Pendidik, Peserta Didik, dan Orang Tua | 23

Sabarudin

Merawat Mentalitas Pembangunan di Masa Pandemi | 49

Agus Saputro

Perilaku Tatanan Kesehatan, Moralitas, Kerja dan Keberagaman di Era Pandemi Covid-19 | 63

Masdjuri

**Muslim Jawa Berdamai Dengan Corona:
Memahami Beragam Ekspresi Keagamaan Masyarakat Pinggiran
Merespon Pandemi | 71**

Achmad Zainal Arifin

***Mbuh Piye Carane*: Inovasi Ugahari Oleh Desa dalam Merespon
Pandemik Covid-19 | 93**

Ambar Sari Dewi

**Pengamalan Agama di Tengah Pandemi Covid-19: Telaah Kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB Perspektif *Ahlussunnah
Wal-Jama'ah An-Nahdliyyah* | 115**

Badrin

Facebook Sarang *Hoax* Selama Pandemi Covid-19 | 133

Nur Hadi Prabawa

Meningkatnya Kejahatan Pencurian Kabupaten Klaten di Masa Pandemi Covid-19 | 155

Nurul Fitriana

Munculnya Stigma Masyarakat Kabupaten Semarang Jawa Tengah Sebagai Akibat *Priming* Pemberitaan Covid-19 di Facebook | 173

Misfalah

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Komunikasi dan Interaksi Sosial Pendidikan di MAN 2 Yogyakarta | 199

Alfina Hawawi

Kebijakan Larangan Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sebagai Alat Untuk Menertibkan Masyarakat | 227

Nurhanny Agusti

Fenomena Covid-19 Sebagai Pendorong Terjadinya Perubahan Sosial Pendidikan | 243

Nur Kholisoh

Perlunya *Social Media Distancing* Dalam Menghadapi Covid-19 | 265

Regina Cahyanti

Peran MCCC Sebagai Lembaga Sosial di Era Pandemi Covid-19 | 295

Ramadhan Widiatoro

Peningkatan Penggunaan Media Sosial Pada Aktivitas Mahasiswa dan Pelajar di Yogyakarta | 327

Nurma Rafiki

Penanganan Covid-19 Oleh Pemerintah dan Masyarakat | 345

Laisa Matania Firizki

**Muslim Jawa Berdamai Dengan Corona:
Memahami Beragam Ekspresi Keagamaan
Masyarakat Pinggiran Merespon Pandemi**

Achmad Zainal Arifin

*Prodi Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN
Sunan Kalijaga*

Pendahuluan

*“Dulu dibilang,
kalo habis sholat ndak usah salaman, ndak percaya”
“Dulu paling ndak suka kalau lihat perempuan bercadar,
sekarang yang lelaki malah disuruh bercadar juga”
“Dulu kalau mau sholat imam selalu minta merapatkan shof,
sekarang malah harus berjarak”*

Ungkapan bernada sindiran ataupun sekedar *joke* seperti diatas, sempat menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya di dunia maya. Tentu ada cukup banyak ungkapan-ungkapan sejenis lainnya yang terlontar, sebagai bentuk ekspresi keagamaan, di masyarakat ketika merespon berbagai kebijakan yang ada terkait pandemic Covid-19 yang belum menunjukkan tanda kapan akan berakhir. Wacana *new normal* yang muncul beberapa bulan terakhir juga direspon secara beragam oleh berbagai kelompok masyarakat, baik dilihat dari perbedaan status sosial, ekonomi, politik, maupun budaya (Agustino, 2020; Taufik & Warsono, 2020), lebih-lebih dari perbedaan kelompok agama yang ada di masyarakat (Darmalaksana, 2020; Zulkarnain, Nurdin, & Gojali, 2020). Dalam konteks ini, kehidupan beragama tentu juga terdampak cukup serius karena kasus pandemi ini, meskipun masih sedikit kalangan akademisi yang secara spesifik melakukan kajian pada tataran akar rumput. Langkanya kajian terkait hal ini bisa jadi memang menunjukkan timpangnya pemberitaan media yang hanya fokus melihat isu pandemi beserta dampak-dampaknya dalam perspektif masyarakat kota, khususnya yang disuarakan oleh kalangan terdidik perkotaan, baik yang mewakili bidang medis, ekonomi, sosial, maupun politik. Sementara kehidupan keagamaan yang selama ini lebih diidentikkan dengan masyarakat desa ataupun masyarakat pinggiran, cenderung terabaikan.

Pembicaraan terkait Covid-19 dari kalangan agamawan memang sempat muncul dan menjadi *trending* topik beberapa saat di media sosial, sayangnya hal tersebut lebih terkait dengan sisi negatif kelompok agama, khususnya terkait dengan Jamaah Tabligh yang sempat berencana menghelat kegiatan keagamaan akbar yang diikuti peserta dari mancanegara meski pada akhirnya batal dilaksanakan. Apalagi, pembatalan acara tersebut ternyata tidak serta-merta menghentikan keterkaitan kelompok keagamaan ini dengan merebaknya wabah Covid-19 di tanah air. Ada beberapa anggota Jamaah Tabligh yang kemudian terindikasi telah terpapar Covid-19 sejak mereka menghadiri kegiatan serupa di Malaysia dan inilah yang kemudian menempatkan Jamaah Tabligh sebagai salah satu kluster penting penyebaran Covid-19 pada fase-fase awal (Dahlan, 2020; Mustautina, 2020).

Minimnya pemberitaan terkait Covid-19 dengan perspektif masyarakat desa atau pinggiran baru mulai mendapatkan perhatian yang dari media sosial ketika masyarakat kota, khususnya di Jakarta dan kota-kota satelit di sekitarnya, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan, dihadapkan pada keinginan untuk melaksanakan ritual Mudik Idul Fitri. Data terkait korban positif Covid-19 di wilayah pedesaan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar memang diawali oleh mereka yang memiliki riwayat perjalanan ke dan dari kota-kota tersebut. Itu pun lebih terkait dengan informasi munculnya transmisi lokal di beberapa desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul yang memang memiliki cukup banyak warga yang bekerja di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Artikel ini mencoba untuk menyajikan beragam bentuk adaptasi masyarakat Islam Jawa, khususnya terkait dengan ekspresi keagamaan masyarakat pinggiran, dengan memfokuskan pada sebuah desa di Kabupaten Sleman, yang *notabene* masih masuk zona hijau, akan tetapi karena masifnya pemberitaan terkait pandemic ini juga ikut terdampak dan memaksa warganya untuk mengikuti beragam kebijakan terkait Covid-19, khususnya terkait protokol kesehatan, yang sedikit banyak telah mengubah pola kehidupan keagamaan yang lebih didominasi oleh kehidupan komunal meski disertai dengan kegamangan dan penuh rasa curiga. Beragam ekspresi yang dinarasikan secara *socio-ethnography*, memberikan gambaran bagaimana Muslim Jawa di wilayah pinggiran atau pedesaan beradaptasi dengan berbagai kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 ini.

Masjid dan Mushola yang Berseberangan: Sekilas tentang Dusun Kembang

Sebut saja dusun yang menjadi lokasi penelitian sosio-ethnografi ini Dusun Kembang. Terletak di Kabupaten Sleman wilayah Barat, hampir berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Dusun Kembang sendiri dihuni oleh sekitar 170 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi dua RW. Mayoritas warga di Dusun Kembang ini berprofesi sebagai petani dan pedagang. Hanya ada beberapa warganya yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa instansi di level Kabupaten atau Kotamadya. Letak perumahan yang ada di Dusun Kembang ini nampak menggerombol cukup padat, namun dikelilingi oleh lahan persawahan yang cukup luas. Kondisi semacam ini tentu memungkinkan munculnya pola interaksi sosial yang cukup akrab diantara warga dusun. Selain pola perumahan yang menggerombol membawa kehangatan dan keakraban warga, pola semacam ini juga memudahkan warga untuk mendeteksi masuknya orang luar dusun ke dusun mereka. Hanya ada satu jalan aspal yang cukup lebar yang menghubungkan Dusun Kembang dengan dusun-dusun lain di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menutup akses masuk ke Dusun Kembang sangatlah mudah. Tinggal memasang portal bambu di jalan aspal tersebut, maka bisa dipastikan warga luar dusun akan kesulitan untuk masuk tanpa pantauan.

Dari sisi keberagaman, mayoritas warga di Dusun Kembang menganut agama Islam, dengan berbagai corak pemahaman doktrin ke-Islaman yang berbeda satu dengan yang lain. Secara umum, bisa dikatakan kelompok Islam yang paling banyak diikuti di Dusun Kembang ini adalah Islam Jawa. Istilah Islam Jawa yang saya sebutkan disini berbeda dengan makna Islam Kejawaen (Geertz, 1960b; M. R. Woodward, 2004) yang biasanya dihubungkan dengan kelompok-kelompok penghayat atau aliran kepercayaan. Secara ritual keagamaan sehari-hari bisa dikatakan lebih dekat dengan Islam tradisional dalam pengertian kelompok Nahdlatul Ulama (NU), akan tetapi tidak tepat kalau dimasukkan dalam kategori santri, sebagaimana Geertz mengelompokkan NU, karena Islam Jawa lebih mementingkan ritual yang dilaksanakan dengan bahasa Jawa dibandingkan *ibadah-ibadah mahdlloh* sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh kelompok santri (Geertz, 1960a). Islam Jawa, dalam konteks ini lebih merujuk pada kelompok warga yang mengklaim diri tidak menjadi bagian dari Muhammadiyah maupun NU, apalagi terkait atau dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya. Secara sederhana, mereka menganut agama Islam sebagaimana yang diturunkan oleh orang tua mereka dan cenderung menjadikan Islam hanya sebagai identitas pelengkap saja dari

keseharian mereka yang lebih lekat dengan nilai-nilai Jawa dibandingkan doktrin-doktrin keislaman sebagaimana kalangan santri (Mark R. Woodward, 2011).

Di Dusun Kembang sendiri, kelompok Islam Jawa ini seringkali menjadi sasaran kritik dari mereka yang berafiliasi dengan Muhammadiyah ataupun kelompok Salafi yang muncul di Dusun Kembang sejak tahun 2005 melalui pendirian sebuah yayasan, sebut saja al-Makkah, yang menaungi lembaga pendidikan pesantren untuk putra dan putri. Sementara untuk kalangan Nahdliyyin (NU) hanya ada satu atau dua kepala keluarga saja yang secara terang-terangan menunjukkan afiliasinya. Meskipun terdapat berbagai macam kelompok dalam Islam yang dalam konteks masyarakat Indonesia secara umum seringkali dihadap-hadapkan, yaitu: kelompok Muhammadiyah dan Salafi di satu sisi dengan kelompok Islam Jawa dan NU di sisi yang lain, namun keberadaan kelompok-kelompok tersebut saat ini relatif jauh dari konflik. Seakan, diantara mereka sudah menyadari posisi masing-masing dalam berbagai perbedaan ketika mengekspresikan keberagaman mereka sehari-hari. Hanya pada momen-momen tertentu saja yang berpotensi untuk memunculkan friksi, meskipun tidak sampai pada level gontok-gontokan atau saling serang dengan kata-kata, karena secara umum mereka jarang berkumpul dalam satu forum keagamaan yang ada. Satu-satunya momen yang mengumpulkan mereka hanyalah pelaksanaan ibadah Shalat Jum'at dan pihak Takmir sudah mengantisipasi potensi munculnya friksi tersebut dengan menghadirkan khatib-khatib yang dipandang moderat dari berbagai kalangan, termasuk dari wakil aparat desa dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Bagi orang dari luar Dusun Kembang, satu simbol kehidupan keberagaman yang paling menonjol dan mudah diamati adalah keberadaan masjid dan mushola yang cukup besar dan hanya dipisahkan oleh jalan utama dusun yang berjarak tidak lebih dari 20 meter. Unikny lagi, masjid dan mushola tersebut memiliki nama yang sama al-Amin. Menurut keterangan Mbah Gimam, salah seorang takmir. Masjid al-Amin yang berdiri sekarang, dulunya adalah kebun yang dibeli oleh sebuah Yayasan yang dimiliki oleh salah satu kelompok Salafi dengan maksud untuk mendirikan pesantren. Kemudian, sebagian tanah di dekat jalan utama Dusun Kembang diwakafkan untuk masjid dan dicarikan dana pembangunan masjid sepenuhnya oleh pihak yayasan. Karena sudah diwakafkan dan bangunannya memang lebih besar, maka takmir memutuskan untuk menurunkan status Masjid al-Amin yang dulu menjadi Mushola al-Amin dan tetap digunakan untuk sholat lima waktu dan kegiatan Taman Pendidikan al-Qur'an. Representasi dari dua bangunan

rumah ibadah ini ternyata mampu menggambarkan dinamika umat Islam di Dusun Kembang. Masjid al-Amin, yang notabene menjadi ruang utama untuk santri-santri yayasan Salafi, seringkali diposisikan berhadap-hadapan dengan jamaah Mushola al-Amin, yang kebanyakan diisi oleh Islam Jawa. Meskipun belum pernah ada konflik diantara keduanya, namun ketegangan-ketegangan antar keduanya terkadang muncul ke permukaan, terutama ketika bertepatan dengan momen-momen tertentu yang bagi Islam Jawa dianggap penting dan perlu untuk diadakan selamatan atau kenduri, seperti satu Muharam (Sura), ketika ada warga yang meninggal dunia, ataupun berbagai tradisi lain, yang oleh jamaah Salafi seringkali dijadikan sasaran kritik karena melaksanakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad (Hasan, 2008; Jamhari & Jahroni, 2004).

Dengan mengelompoknya warga Dusun Kembang yang beragama Islam di kedua tempat ibadah tersebut, maka dengan jelas terlihat bahwa jamaah Masjid al Amin bisa dikatakan berada dalam kategori kelompok Islam yang memperjuangkan kemurnian aqidah, sehingga berbagai macam bentuk tradisi Muslim Jawa seringkali diberi label “bid’ah” dan bahkan “syirik” (Ali, 2008; Jaiz, 2008) yang tentu saja apabila tidak dijembatani dengan baik oleh takmir, termasuk penentuan khatib jumat yang melibatkan semua pihak yang ada, termasuk perangkat desa dan KUA. Tentu saja, kesimpulan sederhana ini tidak akan sama persis dengan kondisi di lapangan karena memang pada dasarnya masjid dan mushola bukan seperti gereja yang anggota jamaahnya terdaftar dengan rapi dan ada semacam “kewajiban” untuk beribadah di tempat dimana jamaah tersebut terdaftar. Akan tetapi, secara sosiologis bisa dijadikan sebagai alat untuk membantu melakukan analisis terkait dinamika kelompok-kelompok dalam Islam, yang biasanya hanya terlihat dengan jelas garis batas antar kelompok tersebut hanya ketika kita melihat elit atau pimpinannya. Pada tataran akar rumput, batas antar kelompok dalam Islam tersebut seringkali hilang, melebur dengan berbagai aktivitas sosial-keagamaan masyarakat yang lebih disatukan oleh identitas sosio-kultural mereka sebagai warga dusun (Mulkhan, 1998).

Dalam konteks inilah, masalah terkait respon masyarakat terhadap kebijakan Covid-19 akan dikaji. Bagaimana beragam ekspresi keagamaan ditunjukkan oleh jamaah dari kedua tempat ibadah ini, yang secara sederhana merepresentasikan dua kelompok besar dalam Islam di Indonesia, yaitu: mereka yang pro dengan tradisi lokal sehingga memunculkan istilah “Islam Jawa” dengan mereka yang lebih dekat dengan model kelompok Islam yang mengutamakan kemurnian ajaran Islam.

Kebijakan Covid-19 dan Tantangan Masyarakat Komunal

Sebagaimana yang sudah disinggung di bagian pendahuluan, timpangnya informasi terkait dengan Covid-19 antara perspektif “kota” dan “desa” menjadi sebuah ironi karena sebagian besar penduduk kita bertempat tinggal di desa, yang tentu saja memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Mengapa disebut ironi? Karena pada akhirnya kebijakan terkait dengan Covid-19 sebagian besar dibuat dengan perspektif “kota” dan kemudian dipaksakan untuk diberlakukan juga seluruh pelosok desa, sehingga memunculkan tantangan yang jauh lebih besar bagi masyarakat desa untuk beradaptasi dan melaksanakan kebijakan tersebut. Pasca diumumkannya pasien pertama positif Covid-19 oleh pemerintah, berbagai kebijakan telah diambil, mulai dari seruan untuk *Work from Home* (WfH), yang kemudian serentak diikuti dengan diliburkannya semua sekolah, wacana *lockdown* yang sempat dilakukan sepihak oleh berbagai kampung, darurat Covid-19, hingga dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar di Indonesia (Adawiyah & Solichati, 2020; Yunus & Rezki, 2020), telah memunculkan tantangan tersendiri bagi masyarakat pedesaan yang juga terpaksa atau dipaksa harus ikut mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut dalam kehidupan keseharian mereka, terlebih aturan protokol kesehatan yang salah satunya mengharuskan adanya *social distancing* maupun *physical distancing* (Pradana & Casman, 2020).

Sepintas, kebijakan tersebut secara tidak langsung menghantam dengan telak sendi-sendi kehidupan masyarakat desa, khususnya masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa, yang lebih mementingkan keharmonisan antara makro dan mikro kosmos dengan penekanan pada pentingnya kehidupan komunal atau kolektif masyarakat. Masyarakat pedesaan Jawa yang sangat lekat dengan jargon “*mangan ora mangan kumpul*” (makan atau tidak yang penting bersama) serta memiliki berbagai ritual dan tradisi sosial keagamaan dalam setiap siklus kehidupan mereka, sejak dari dalam kandungan hingga meninggal dunia, yang terwujud dalam tradisi slametan dan kenduren (Amin, 2000; Karim, 2017; Sholikhin, 2010). Dalam konteks inilah, masyarakat pedesaan, khususnya yang sudah lekat dengan beragam tradisi atau mereka yang termasuk ke dalam kategori Islam Jawa sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya memiliki tantangan relatif lebih berat dan kompleks untuk menjalankan kebijakan terkait pandemi Covid-19, termasuk protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artikel ini tentu bukan untuk mengekspos adanya pembangkangan sipil terhadap kebijakan pemerintah, akan tetapi lebih menggambarkan bagaimana

masyarakat di pedesaan memiliki daya adaptasi yang luar biasa yang disatu sisi tetap ingin menunjukkan loyalitas mereka kepada berbagai bentuk kebijakan pemerintah, akan tetapi disisi lain juga memiliki mekanisme alamiah untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan agama yang selama ini tidak bisa lepas dari kehidupan keseharian mereka.

Dalam konteks masyarakat Jawa, setiap pergantian siklus kehidupan diyakini selalu menempatkan manusia dalam kondisi “krisis” yang perlu untuk diiringi dengan berbagai upaya agar bisa melewati krisis tersebut dengan baik (Subandrijo, 2000). Tentu saja, pelaksanaan ritual untuk mengiringi pergantian siklus kehidupan disini tidak dilaksanakan secara privat atau hanya melibatkan anggota keluarga saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat di sekitarnya, yang biasa dikelompokkan dengan istilah “*sak kukuban kenduren*” (satu kelompok kenduri atau slamatan), yang biasanya terdiri dari 70 sampai 125 kepala keluarga. Pelibatan warga secara luas semacam ini tentu tidak sekedar untuk meminta doa restu mereka agar tuan rumah bisa melewati krisis dengan selamat, akan tetapi juga memiliki makna dan status sosial yang fundamental bagi kehidupan di pedesaan. Sebagai contoh, ketika sebuah keluarga akan dikaruniai seorang anak, maka ketika usia kehamilan memasuki empat bulan, mereka akan melaksanakan tradisi Mapati (memperingati empat bulan usia kehamilan) yang dipandang sebagai saat-saat kritis bagi calon bayi karena pada usia empat bulan inilah, Allah akan meniupkan ruh ke dalam janin dan akan ditetapkan untuk janin tersebut empat hal: jodoh, rezeki, kematian, dan nasib. Oleh karena itu, Muslim Jawa merasa perlu mengiringi masa-masa kritis dengan mengumpulkan tetangga *sak kukuban kenduren* ditambah dengan keluarga dan kerabat mereka untuk berdoa bersama demi kebaikan dan keselamatan janin tersebut. Inilah mengapa berbagai bentuk ritual yang dilaksanakan oleh Muslim Jawa di pedesaan seringkali disebut dengan istilah yang sama “Slamatan”, mulai dari Mapati, Mitoni (tujuh bulanan), Kelahiran, Aqiqah, Sunatan, Nikahan, hingga Kematian (Sholikhin, 2010; Wahyana Giri, 2010; Yana, 2010).

Tentu saja, pelaksanaan beragam ritual tersebut tidak hanya memiliki makna teologis untuk mendapatkan keselamatan sesuai dengan ritual yang dimaksudkan, akan tetapi seringkali juga dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh sebuah keluarga di masyarakat. Status sosial sebuah keluarga biasanya akan bisa dengan mudah terlihat dari pelaksanaan ritual-ritual tersebut. Selain itu, seringkali ritual yang diadakan di pedesaan juga dijadikan sebagai sarana untuk menilai seberapa besar loyalitas warga dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat.

Apabila ada warga yang jarang atau tidak pernah menghadiri undangan dari warga lainnya, maka sanksi sosial berupa pengucilan dari berbagai aktivitas sosial akan secara otomatis turun. Dari sini kita bisa memahami mengapa Muslim Jawa sangat lekat dengan kehidupan komunal dan tidak bisa lepas begitu saja dari “ketergantungan sosial” antar warganya yang sudah sangat kuat mengakar dalam kehidupan pedesaan sehingga identik dengan istilah “*mangan ora mangan kumpul*”.(Aulia, 2009; Sholikhin, 2010)

Dari berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan, memang tidak semua mendapatkan respon yang sama. Ada kebijakan dan protokol kesehatan yang begitu saja dilaksanakan, misalnya menyediakan air untuk cuci tangan di depan rumah, akan tetapi ada juga aturan yang dilaksanakan dengan agak gamang, semisal menggunakan masker dan jaga jarak (*social* atau *physical distancing*). Tentu saja, ada beragam motivasi dan alasan yang menyertai respon-respon tersebut, salah satunya sebagaimana dijelaskan sebelumnya terkait kehidupan komunal Muslim Jawa di wilayah pedesaan. Dalam konteks masyarakat di Dusun Kembang, beragam respon ini akan digambarkan secara lebih detail, khususnya terkait dengan fenomena bagaimana warga Muslim Jawa di dusun tersebut mengekspresikan keberagaman mereka di tengah pandemi Covid 19, meskipun dusun mereka sejak awal hingga tulisan ini dibuat masih dalam status zona hijau.

Respon Muslim Jawa di Dusun Kembang terhadap Implementasi Protokol Kesehatan

Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa karakteristik masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dari ciri masyarakat komunal dengan beragam ritual-ritual keagamaan yang seakan sudah menjadi kewajiban sosial untuk dilaksanakan, baik oleh tuan rumah, maupun tetangga kiri-kanan untuk menghidirinya. Dalam konteks kehidupan yang bersifat komunal inilah nampak jelas tantangan yang harus dihadapi oleh Muslim Jawa di Dusun Kembang ketika mereka harus mengimplementasikan berbagai kebijakan dan aturan terkait protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Mereka dipaksa untuk melakukan perubahan yang relatif lebih berat dibandingkan dengan penduduk perkotaan, apalagi jika dikaitkan dengan mayoritas warganya yang berprofesi sebagai petani atau pekerja di sektor informal, seperti menjadi buruh harian lepas di bidang konstruksi (menjadi tukang atau pelayan tukang), penjual makanan asongan, ataupun sekedar sebagai ibu rumah tangga. Diantara aturan yang

dirasa cukup memberatkan mereka terkait kebijakan penanggulangan Covid-19, mulai “*work from home*” hingga implementasi protokol kesehatan, terutama memakai masker dan jaga jarak. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian mereka dan juga adat dan kebiasaan mereka. Tiga aturan inilah yang akan dibahas secara mendetail dalam bab ini dengan mengedepankan latar belakang masyarakat Dusun Kembang yang pola hidupnya sangat erat kaitannya dengan dua tempat ibadah yang menjadi simbol perbedaan cara pandang keagamaan warga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Kebijakan *Work from Home* (WfH) dan *Lockdown* Lokal

Istilah “*Work from Home*” atau “bekerja dari rumah” sempat menjadi *trending topic* di dunia maya sekitar pertengahan Maret 2020 ini, menjadi suatu kebijakan yang terasa “aneh” bagi mayoritas warga Dusun Kembang yang umumnya berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Memang, himbauan untuk melaksanakan WfH utamanya adalah ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang memungkinkan untuk melakukan pelayanan administratif kepada masyarakat melalui jaringan internet. Begitupun dengan beberapa perusahaan yang pastinya memiliki beberapa bagian atau divisi yang memungkinkan untuk membawa pekerjaan mereka ke rumah. Tapi bagi buruh harian lepas dan petani, tentu kebijakan ini terasa sulit untuk dilakukan. Bagi mereka, tidak pergi ke tempat kerja bermakna tidak akan ada pemasukan atau tidak makan. Memang, pada akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi, akan tetapi hal tersebut tentu saja bersifat temporer dan tidak bisa menjamin warga yang tidak bekerja akan bisa makan selama pandemi berlangsung. Terlebih, tidak semua warga di Dusun Kembang terdata untuk mendapatkan bantuan pemerintah tersebut.

Alasan yang terakhir ini pulalah yang mengemuka ketika wacana *lockdown* merebak untuk diberlakukan. Malahan, sebelum pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan *lockdown*, akan tetapi memilih opsi untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), warga di Dusun Kembang, sebagaimana warga kampung lain di Yogyakarta, sudah menerapkan kebijakan *lockdown* secara lokal. Mereka menutup akses masuk ke wilayah Dusun Kembang dengan membuat portal dari bambu dan mendirikan *deklit* (tenda) untuk berteduh petugas yang dijadwal secara bergilir untuk membuka dan

menutup portal sambil menyemprot siapa saja yang akan memasuki wilayah Dusun Kembang. Kebijakan *lockdown* lokal ini ternyata diterapkan berbeda antara dua Rukun Warga (RW) yang ada di Dusun Kembang. Menariknya, dari dua Satgas yang dibentuk, ketua Satgas dari masing-masing RW ini berafiliasi dengan masjid dan mushola yang ada di Dusun Kembang. Ketua Satgas RW satu merupakan jamaah aktif Mushola al-Amin, yang masuk dalam kategori Islam Jawa, sementara ketua Satgas dua berafiliasi dengan salah satu ormas keagamaan modern dan menjadi jamaah di Masjid al-Amin.

Keberadaan dua ketua Satgas Covid-19 yang kebetulan memiliki afiliasi yang berbeda ini ternyata memunculkan respon yang berbeda terhadap implementasi kebijakan dan protokol kesehatan diantara keduanya. Ketua Satgas Covid-19 RW 2, yang kebetulan juga berafiliasi dan menjadi anggota aktif salah satu badan otonom sebuah ormas keagamaan cenderung untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh ormas keagamaan tersebut, sehingga kegiatan keagamaan di masjid terpaksa harus vakum cukup lama, sejak sebelum Bulan Ramadhan hingga sekitar pertengahan Bulan Juni mulai melaksanakan shalat Jumat dengan protokol kesehatan yang ketat dan khusus untuk warga Dusun Kembang saja. Sebaliknya, ketua Satgas Covid-19 di RW 1 merupakan jamaah mushola dan secara formal tidak berafiliasi ke ormas keagamaan tertentu cenderung “lebih longgar”, termasuk tetap melaksanakan kegiatan di mushola, seperti shalat tarawih dan shalat jamaah harian, meski juga dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memasang alat cuci tangan, menyediakan sabun dan *hand sanitizer* serta penggunaan masker. Bahkan, ketika masjid dirasa sudah cukup lama tidak melaksanakan Jumat, padahal Dusun Kembang termasuk dalam kategori Zona Hijau Covid-19, ketua Satgas Covid-19 RW 1 mengizinkan untuk dilaksanakannya sholat Jumat di mushola karena dianggap lebih aman dan tidak memicu orang dari luar Dusun Kembang untuk ikut bergabung dalam pelaksanaan shalat Jum’at tersebut.

Perbedaan implementasi kebijakan terkait Covid-19 juga terlihat dengan jelas ketika dilakukan rapat Takmir Masjid al-Amin menyikapi pelaksanaan Kurban Bersama tahun 2020. Sebagian jamaah masjid menginginkan agar Kurban Bersama untuk tahun ini ditiadakan saja, mengingat sangat berpotensi untuk menimbulkan kerumunan massa. Bahkan, beberapa jamaah masjid sudah mengikuti anjuran

atau instruksi salah satu ormas keagamaan untuk mengalihkan dana Kurbannya langsung untuk membantu mereka yang terdampak Covid-19. Sementara mayoritas jamaah mushola tetap menginginkan tetap dilaksanakannya Kurban Bersama. Sebagai jalan tengah, pelaksanaan Kurban Bersama yang biasanya dipusatkan di satu tempat (halaman mushola), dibagi menjadi tiga kelompok dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk memecah kemungkinan terjadinya kerumunan saat pelaksanaan.

Dalam konteks respon terhadap kebijakan terkait Covid-19 ini, muncul fenomena yang cukup menarik, bahwa kelompok Islam Jawa, yang sejatinya banyak digambarkan sebagai kelompok yang tidak begitu aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, khususnya ibadah harian dalam Islam atau ibadah mahdlah, malah justru terlihat lebih memiliki ghirah (semangat) untuk menuntut dilaksanakan berbagai bentuk ibadah kolektif dibandingkan dengan kelompok yang sebelumnya dinilai lebih dekat dengan istilah santri yang identik dengan ketaatan yang tinggi dalam pelaksanaan ibadah mahdlah secara berjamaah. Gambaran lebih jauh terkait dengan fenomena ini akan lebih jelas terlihat ketika kita diskusikan bagaimana implementasi regulasi terkait protokol kesehatan di Dusun Kembang.

2. Implementasi Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Keagamaan

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan warga Dusun Kembang, tidak terkecuali dengan kehidupan keberagaman mereka. Masjid dan Mushola al-Amin juga terlihat menyediakan alat cuci tangan berupa kran yang dilengkapi dengan sabun cair di depan pintu masuk kedua tempat ibadah tersebut. Selain itu, bagian sisi dalam, baik masjid dan mushola sama-sama menyisakan tumpukan karpet di pojok ruangan yang sebelum masa pandemi selalu terhampar untuk mengatur shaf jamaah. Hanya saja, keramik di masjid tertempel rapi stiker berwarna kuning dengan tulisan huruf shod besar dan dibawahnya tertulis “silahkan berdiri disini” tiap jarak 1.5 meter. Sementara di mushola, hamparan karpet digantikan dengan tikar plastik panjang yang sebelumnya hanya digunakan apabila ada pengajian rutin. Secara tidak langsung, perbedaan ini mengindikasikan bagaimana jamaah masjid dengan ketat menerapkan protokol kesehatan terkait dengan anjuran untuk menjaga jarak, sementara bagi jamaah mushola, mereka menyisakan ruang untuk masing-masing jamaah seberapa jauh mereka perlu untuk menjaga jarak.

Memang, kedua tempat ibadah ini pada masa-masa awal pandemi, sudah meliburkan berbagai kegiatan rutin keagamaan yang ada, mulai dari TPA, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, dan juga Sholat Jumat. Hanya shalat maktubah (shalat lima waktu) saja yang dilaksanakan dengan tiga atau empat orang jamaah saja. Memasuki bulan suci Ramadhan, beberapa warga Dusun Kembang sudah mulai ada yang menyuarakan untuk mengadakan shalat tarawih. Hal ini kemudian direspon oleh Takmir masjid dan mushola dengan mengadakan rapat persiapan Ramadhan. Dalam rapat diputuskan segala bentuk kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh warga Dusun Kembang, seperti: buka puasa bersama, pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, dan pengajian umum, diputuskan untuk ditiadakan. Akan tetapi untuk shalat tarawih, muncul perbedaan pendapat, jamaah masjid berpandangan untuk tidak dilaksanakan, sementara sebagian jamaah mushola menghendaki tetap dilaksanakan meskipun dengan mematuhi protokol kesehatan dan tanpa disiarkan melalui pengeras suara. Parlan, salah satu takmir yang biasa berjamaah di mushola berargumen:

“Kasihlah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat menginginkan untuk dilaksanakannya shalat tarawih, dan kita juga tidak ada yang tahu, tahun depan masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadhan atau tidak. Selain itu, toh di wilayah kita termasuk wilayah zona hijau, jadi lebih bagus kalo tetap diadakan shalat tarawih, meskipun jamaahnya bisa dibatasi hanya mereka yang biasa jamaah di mushola saja” (Observasi Rapat Panitia Ramadhan, 11 April 2020).

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang muncul dalam rapat, akhirnya ketua takmir mengambil kesimpulan untuk menyerahkan kepada jamaah masing-masing untuk melaksanakan shalat tarawih atau tidak, akan tetapi takmir tidak akan membuatkan jadwal untuk imam dan pengisi kultum sebagaimana biasa. Akhirnya, pelaksanaan shalat tarawih hanya dilaksanakan di mushola saja, dengan jumlah jamaah yang memang jauh berkurang dibandingkan dengan shalat tarawih pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain perbedaan antara jamaah masjid dan mushola dalam menyikapi berbagai kegiatan keagamaan yang bersifat umum dan berjamaah, penerapan protokol kesehatan dalam konteks kehidupan

keseharian di mushola sendiri juga beragam. Ada jamaah yang memang masih konsisten dengan penggunaan masker, misalnya, namun yang bertahan seperti itu hanya dua atau tiga jamaah saja. Salah seorang jamaah, Pak Paidi, sempat menuturkan sebagai berikut:

“lha pripun nggih, kulo niku pendamelane nggih naming ten sabin, mboten pernah ngagem masker, rasane malah sesak yen ngagem masker. Inshaallah mboten nopo-nopo, wong nggih sik jamaah ten ngriki nggih naming tonggo kiwo-tengen mawon kok...”

[Bagaimana ya, pekerjaan saya tiap hari ke sawah, tidak pernah memakai masker, rasanya malah susah bernapas kalo memakai masker, insyaallah tidak apa-apa, apalagi yang sholat jamaah di sini kan hanya tetangga kiri dan kanan saja] (Wawancara dengan Paidi, 28 Juli 2020).

Model pemikiran sebagaimana yang disampaikan Pak Paidi diatas sepertinya memang menjadi alasan sebagian besar jamaah mushola. Nampak jelas, bahwa pernyataan semacam ini, selain didasarkan pada situasi yang dirasa aman, juga memiliki makna kepasrahan yang sangat kental terhadap takdir yang Maha Kuasa atau dalam konteks Budaya Jawa dikenal dengan istilah *“narimo ing pandum”*.

Begitu juga dengan sarana cuci tangan yang disediakan di depan mushola juga hanya ramai digunakan dua atau tiga minggu sejak jamaah di mushola diaktifkan kembali pasca Idul Fitri kemarin. Malahan, sarana cuci tangan lebih banyak digunakan ketika jamaah selesai mengadakan tahlilan atau pengajian yang menghidangkan makan untuk jamaah. Memang untuk konteks mushola atau tempat ibadah yang lain, mungkin bisa dipahami mengapa sarana cuci tangan yang disediakan tidak begitu banyak digunakan jamaah. Beda dengan mall atau toko modern yang biasanya tempat cuci tangan selalu terlihat ramai dan terkadang memunculkan antrian yang cukup panjang. Ibu Karno, selaku jamaah aktif di mushola menuturkan analisis yang menarik terkait kurang optimalnya sarana cuci tangan yang sudah disediakan di depan mushola:

“Begini mas, rata-rata ibu-ibu yang menuju ke mushola untuk berjamaah kan sudah mengenakan mukena dari rumah, hanya satu atau dua saja ibu-ibu yang memang ninggal mukena di mushola. Jadi, sudah barang tentu sebelum ke mushola mereka sudah cuci tangan dan berwudhu dari rumah, sementara yang belum, biasanya datang juga

langsung masuk ke tempat wudhu, jadi ya lebih baik tempat wudhu yang di dalam mushola juga ditambahkan sabun cuci tangannya” (Wawancara dengan Bu Karno, 23 Juli 2020).

Dari penuturan Bu Karno diatas, tentu kita tidak bisa menilai begitu saja bahwa kurang optimalnya pemanfaatan sarana cuci tangan di mushola sebagai indikator tidak diterapkannya protokol kesehatan oleh warga Muslim Jawa di Dusun Kembang.

Selain penggunaan masker dan cuci tangan, sepertinya anjuran untuk jaga jarak menjadi bagian dari implementasi protokol kesehatan yang dirasa paling berat oleh Muslim Jawa di Dusun Kembang. Hal ini tentu saja berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan Muslim Jawa dalam menjalankan keyakinan keagamaan mereka. Aturan shaf minimal satu atau dua meter antar jamaah, misalnya, selain terkendala ruang mushola yang relatif lebih sempit dibandingkan masjid, sebagian jamaah mushola juga masih merasa aneh apabila harus berjarak sejauh itu dengan jamaah disampingnya. Karenanya, tidak sedikit kemudian diantara mereka memaknai aturan tersebut hanya sebatas “yang penting sudah berjarak”. Memang, shaf jamaah tidak lagi serapat dulu sebelum pandemi Covid-19 terjadi, akan tetapi dari perspektif aturan ya memang masih belum memenuhi. Disinilah sebenarnya kita bisa memahami bagaimana segala hal yang baru akan direspon secara “kreatif” dengan menghindari potensi benturan sosial yang lebih besar, sesuai dengan prinsip hidup orang Jawa yang menekankan pada keteraturan antara *jagad gedhe* dan *jagad cilik* atau makro dan mikro kosmos (Endraswara, 2010; Suseno, 2001; Sutono, 2015). Selain itu, tradisi salaman setelah selesai jamaah shalat nampaknya juga tidak gampang untuk diubah. Tidak seperti jamaah masjid, yang sebagian besar memang tidak mentradisikan salaman setelah jamaah, bahkan ada yang menghukumi “bid’ah”, jamaah mushola sudah terbiasa saling berjabat tangan setelah shalat berjamaah. Tradisi ini tentu kemudian sangat sulit untuk ditinggalkan begitu saja. Anjuran untuk mengganti jabat tangan dengan gerakan lain, sebagaimana yang banyak dicontohkan di berbagai kampanye tentang protokol kesehatan di televisi, terasa tidak mudah dan hanya bertahan beberapa hari saja. Mbah Ramelan punya penuturan yang menarik terkait dengan hal ini:

Kulo niki nggih naming nderek nopo dawuhipun kyai-kyai riyin, salaman niku sae, triose saget ngrontokkaken dusone wong sing podo salaman. Ning kulo nggih mboten salaman menawi

ten njawi (mushola), nopo malih kalian tiyang ingkang dereng kulo kenal.

[Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh kyai-kyai saya dulu, bahwa salaman itu baik, bisa menghapus dosa antar mereka yang salaman. Tapi saya sendiri kalo di luar (bukan di mushola) ya tidak salaman juga, apalagi dengan orang yang tidak saya kenal] (Wawancara dengan Mbah Ramelan, 25 Juli 2020).

Ritual keagamaan lain, yang sangat kental dalam kehidupan Muslim Jawa di Dusun Kembang, seperti tahlilan dan kenduren yang dilaksanakan di rumah-rumah warga memang secara kuantitas berkurang, akan tetapi tetap dilaksanakan dengan memangkas jumlah undangan disesuaikan dengan situasi rumah warga yang menggelar acara. Kebanyakan hanya melibatkan antara 10 sampai 15 orang undangan yang termasuk anggota inti dari Kelompok Yasinan Dusun Kembang yang memiliki pertemuan rutin tiap Malam Jum'at di Mushola, kecuali jika ada undangan untuk menghadiri hajatan warga. Pelaksanaan tahlil, yang biasanya cukup panjang, juga dipangkas dan disesuaikan dengan situasi. Kalau sebelum masa pandemi, pembacaan tahlil bisa dilakukan hampir satu jam, saat ini rata-rata tinggal 20 sampai 30 menit saja. Selain itu, karena pelaksanaannya ada di rumah warga, maka biasanya protokol kesehatan menjadi salah satu perhatian dari Tim Satgas, khususnya penggunaan masker selama hajatan dilangsungkan.

Penutup: Memahami Cara Berdamai Muslim Jawa dengan Covid-19

Dari uraian tentang bagaimana Muslim Jawa di Dusun Kembang mengekspresikan kebutuhan keagamaan mereka di tengah pandemi Covid 19, tentu saja diperlukan kearifan untuk merespon beragam ekspresi tersebut, meski secara kasat mata bisa disimpulkan protokol kesehatan tidak seratus persen diimplementasikan dalam kegiatan keagamaan mereka. Bagian akhir ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah refleksi terkait mengapa Muslim Jawa di Dusun Kembang memiliki beragam respon dengan harapan tidak memunculkan stigma negatif terhadap mereka karena “kreatifitas” mereka dalam merespon kebijakan terkait pandemi Covid-19.

Setidaknya ada beberapa aspek yang bisa digali lebih jauh sebagai bagian

dari upaya untuk memahami sikap keberagaman Muslim Jawa. *Pertama*, bahwa sikap “berbeda” yang ditunjukkan oleh Muslim Jawa di Dusun kembang harus didudukkan dalam konteks yang tepat sesuai dengan nalar dan cara berpikir mereka yang bisa jadi memang memiliki perbedaan dengan nalar dan cara berpikir orang kota yang diklaim akademik dan cenderung bersifat individual. Kalau meminjam kerangka konseptual Auguste Comte terkait tiga tahapan masyarakat, tentunya bisa kita andaikan sebagai model komparasi antara masyarakat *religious* dengan masyarakat positif, yang tentu antara keduanya memiliki perbedaan dalam melihat problem kehidupan dan cara yang ditempuh untuk mengatasinya (Calhoun, 2007; Ritzer, 2010). Disinilah kita sebenarnya bisa melihat bagaimana Muslim Jawa memberikan kritik terhadap kebijakan terkait pandemi Covid 19 yang cenderung hanya mewakili kelompok akademik saja, tanpa mau melihat dan mempertimbangkan aspek keterwakilan dari kelompok yang diklaim masih berada dalam tahap *religious* atau keagamaan. Ada banyak nilai dan prinsip hidup masyarakat yang seharusnya perlu untuk dibangun kembali karena klaim negatif yang seringkali dilekatkan pada nilai-nilai tersebut. Sikap *narimo ing pandum*, yang diyakini berakar pada konsep “tawakal”, misalnya, bisa dibaca ulang sebagai suatu kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat kita yang bisa digunakan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Setidaknya, dengan sikap “*narimo ing pandum*” masyarakat sudah terlatih tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kita bisa membayangkan kalau masyarakat tidak memiliki sikap ini, maka semua malapetaka yang terjadi sangat berpotensi untuk dibebankan sepenuhnya kepada negara, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju (Barat). Betapa *chaos*-nya situasi bila seluruh warga negara Indonesia sepenuhnya menuntut negara untuk bertanggungjawab memberikan jaminan sosial secara utuh kepada warga negaranya. Oleh karena itu, sebagai wujud apresiasi, seharusnya “kreativitas” kalangan Muslim Jawa seharusnya didudukkan dalam porsi yang benar, terlebih memang situasi masyarakat kota dengan pedesaan relatif berbeda terkait pandemi ini. Sayangnya, masih ada juga kalangan akademisi yang karena ego keilmiahannya memberikan stigma negatif terhadap sikap-sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat di pedesaan.

Kedua, pertimbangan zonasi yang telah disusun oleh tim Satgas (merah, oranye, kuning, dan hijau) seharusnya juga memiliki implikasi terhadap aktivitas mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Sebenarnya, pedoman terkait dengan hal ini sudah ada, meskipun untuk konteks keagamaan dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat perlu untuk dibuat lebih detail lagi. Sayangnya, yang gencar dikampanyekan melalui

berbagai media hanyalah kebijakan-kebijakan terkait dengan situasi dan kondisi di kota-kota besar saja, sehingga tidak sedikit kemudian yang main pukul rata bahwa kebijakan tersebut untuk semuanya. Sebagai contoh, kebijakan terkait pelaksanaan sholat Jumat, biasa dipahami berlaku untuk semua. Sehingga masjid-masjid di wilayah pedesaanpun, yang masuk kategori zona hijau, ikut-ikutan meniadakan pelaksanaan sholat Jumat. Kondisi ini tentu saja berpotensi untuk memunculkan perdebatan terkait boleh atau tidaknya meninggalkan Sholat Jumat karena penyebabnya (Covid-19) sejatinya tidak ada di sekitar masyarakat pedesaan tersebut. Dari sinilah muncul “kreativitas” warga desa untuk tetap bisa menjaga keseimbangan kosmos sebagaimana yang mereka yakini dan bukan sebagai bagian dari upaya untuk tidak mentaati kebijakan pemerintah, sebagaimana yang banyak disuarakan oleh sebagian kecil kelompok Islam yang memang aktif berpolitik dan selalu berseberangan dengan pemerintah.

Ketiga, perlu adanya kesadaran dari semua pihak bahwa masyarakat di wilayah pedesaanlah yang seharusnya dipandang sebagai kelompok yang mengalami dampak paling berat, mengingat mereka harus berhadapan dengan nilai-nilai baru yang bagi mereka berbeda, dan untuk beberapa hal bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang selama ini diyakini dan diamalkan dalam wujud ritual dan tradisi sosial keagamaan di masyarakat. Jadi tidak sebatas dampak ekonomi saja, tapi hampir semua aspek kehidupan bahkan sampai harus mengubah sistem kepercayaan, yang selama ini diyakini menjadi unsur kebudayaan yang paling sulit untuk diubah. Oleh karena itulah, akan lebih bijaksana kalau kemudian melihat proses kreativitas yang muncul sebagai bentuk proses adaptasi yang memang harus dilakukan oleh warga pedesaan untuk bisa tetap memelihara dan melestarikan tradisi-tradisi mereka.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, M. (2008). *Mantan kiai NU meluruskan ritual-ritual kiai ahli bid'ah yang dianggap sunnah : nisfu sya'ban, Rebo wekasan, tingkepan & bid'ah-bid'ah dari Muharram-Dzulhijjah*. Surabaya: Laa Tasyuk! Press.
- Amin, D. (2000). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Aulia. (2009). *Ritual puasa orang Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta: Narasi.
- Calhoun, C. J. (2007). *Classical sociological theory* (2nd ed.). Malden, Mass.: Blackwell Pub.
- Darmalaksana, W. (2020). New Normal Perspektif Sunnah Nabi Saw. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung*
- Endraswara, S. (2010). *Etika hidup orang Jawa : pedoman beretiket dalam menjalani kehidupan sehari-hari* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta: Narasi.
- Geertz, C. (1960b). *The religion of Java*. Glencoe, Ill: Free Press.
- Hasan, N. (2008). The Salafi Madrasas in Indonesia. In F. A. Noor, Y. Sikand & M. v. Bruinessen (Eds.), *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*. Amsterdam: ISIM / Amsterdam University Press.
- Jaiz, H. A. (2008). *Kyai kok bergelimang kemusyrikan : kumpulan masalah Ahmadiyah, Syi'ah, pluralisme agama, syirik, bid'ah, Kristenisasi, dan kemunkaran* (Cet. 1. ed.). Jakarta: Pustaka Nahi Munkar.
- Jamhari, & Jahroni, J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia [Radical Salafi Movement in Indonesia]*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulkhan, A. M. (1998). *Perubahan pola pemurnian Islam di pedesaan : studi kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur : laporan penelitian individual*. Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama, IAIN Sunan Kalijaga.
- Ritzer, G. (2010). *Classical sociological theory* (6th ed.). Boston: McGraw-Hill.

- Sholikhin, M. (2010). *Ritual dan tradisi Islam Jawa : ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta dan Jakarta: Narasi dan Distributor tunggal, Suka Buku.
- Subandrijo, B. (2000). *Keselamatan bagi orang Jawa* (Cet. 1. ed.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Suseno, F. M. (2001). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Woodward, M. R. (2011). *Java, Indonesia and Islam* (1st ed.). Dordrecht: Springer.
- Yana, M. H. (2010). *Falsafah dan pandangan hidup orang Jawa : dilengkapi dengan tata krama, tradisi, kebiasaan dengan butir-butir budaya Jawa, pantangan, karakter dan ritual masyarakat Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta: Absolut.
- Wahyana Giri, M. C. (2010). *Sajen dan ritual orang Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta dan Jakarta: Narasi dan Distributor tunggal, Suka Buku.

E-book:

- Woodward, M. R. (2004). *Islam Jawa; Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*: books.google.com.
- Sutono, A. (2015). *Etika Jawa Sebagai “Global Ethic” Baru*.
- Pradana, A. A., & Casman, C. (2020). *Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah Covid-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. ... Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*.
- Geertz, C. (1960a). *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker. Comparative Studies in Society and History, 2(2), 228-249*.

Jurnal:

- Adawiyah, D. P. R., & Solichati, I. (2020). *Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Covid-19. Sahafa Journal of Islamic ...*
- Agustino, L. (2020). *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator*.
- Dahlan, M. (2020). *Respon Jamaah Tabligh Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Covid-19. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Karim, A. (2017). *Makna ritual kematian dalam tradisi Islam Jawa. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*.
- Mustautina, I. (2020). *Praktik Dakwah Jamaah Tabligh Dan Pengaruhnya*

Terhadap Penyebaran Covid19. *Jurnal Living Hadis*.

Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi*

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.

Artikel Surat Kabar:

Zulkarnain, F, Nurdin, A. A., & Gojali, N. (2020). Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi Covid 19. *Kebijakan fatwa MUI*